

PENGEMBANGAN KURIKULUM SEBAGAI INTERVENSI KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

(CURRICULUM DEVELOPMENT AS A MEANS FOR THE IMPROVEMENT OF EDUCATION QUALITY)

Bambang Indriyanto
Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
e-mail: bambang.indriyanto@kemdikbud.go.id

Diterima tanggal: 23/12/2012, Dikembalikan untuk revisi: 29/12/2012, Disetujui tanggal: 31/12/2012

Abstrak: Tujuan dari tulisan ini adalah mengajukan pengertian bahwa kurikulum dapat menjadi titik tolak bagi peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, tulisan ini mengajukan argumentasi bahwa efektivitas implementasi kurikulum tidak hanya terletak pada isi konsep yang komprehensif, tetapi juga pada kondisi kurikulum tersebut akan dilaksanakan. Kondisi tersebut meliputi kompetensi guru dan kecukupan ketersediaan sarana pendidikan pada tingkat sekolah. Pengembangan Kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang sedang berlangsung sedang dicermati oleh anggota masyarakat. Hal ini tentu saja merupakan konsekuensi kurikulum sebagai bagian dari kebijakan pendidikan. Ada yang mempertanyakan tentang konsepnya, tetapi ada juga yang setuju dengan ide Pengembangan Kurikulum 2013. Namun demikian tulisan ini berpendapat, meskipun ada yang tidak setuju atau setuju, bahwa faktor yang mendasari efektivitas pelaksanaan kurikulum adalah faktor manajemen. Faktor manajemen yang dimaksud meliputi manajemen pada tingkat sekolah dan kelas. Kehadiran teknologi informasi praktis pada setiap aspek kehidupan membawa dampak yang positif terhadap dunia pendidikan.

Kata kunci: mutu pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, kepemimpinan

Abstract: The objective of this paper is to foster the notion that curriculum can serve as a standpoint to improving the quality of education. By stating so, it proposes an argument that the effectiveness of their implementations do not only depend on comprehensiveness of the concept, but also on their relevance to the circumstances in which they are going to be implemented. They include teacher competencies and the adequate availability of education facilities at school level. The on going curriculum development called Curriculum 2013 by the Ministry of Education and Culture are undergoing scrutinization by publics. This has been a consequence of curriculum as a part of education policies. Some cast doubts about the concept, some other support the idea of the development of curriculum 2013. This paper, however, argues, in spite of pro and cons, that management is an underlying factor which ensures the effectiveness of the implementation of the curriculum 2013. The concept of management consists of that in school and classroom levels. The present of information technology virtually in any walk of life, has positive impacts on education.

Keywords: quality education, curriculum, education management, leadership.

Pendahuluan

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan merupakan kebijakan yang sangat dinamis, karena peningkatan mutu pendidikan tidak pernah akan berhenti pada satu titik tertentu. Per-

kembangan berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, dan ekonomi, serta terutama industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi memerlukan sumber daya manusia yang bermutu.

Pendidikan merupakan sarana untuk menghantar pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Dasar teoritis dari argumentasi ini yaitu *human capital theory*. Argumentasi yang dikemukakan oleh teori ini yakni investasi pada manusia akan meningkatkan kompetensinya, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Schultz, 1977; Checchi, 2005). Seiring dengan adanya bukti empiris yang menunjukkan kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin nyata, maka pada sekitar pertengahan tahun 1990 *human capital theory* dikembangkan menjadi konsep *knowledge based economy*. Konsep ini memperkuat *human capital theory* dengan penekanan bahwa sumber daya manusia tidak hanya memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibanding dengan faktor mesin dalam proses produksi, tetapi faktor sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang terbarukan dan tersedia dalam jumlah yang melimpah (*non-scarcity*) (Petters, 2010; Powell & Snellman, 2004; McInstosh, 2008).

Meskipun dari perspektif ekonomi, kontribusi pendidikan cenderung dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi mempunyai dampak *externality*. Sumber daya yang berkualitas tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai modal sosial pembentukan harmonisasi dalam lingkungan kerja (Flap & Boxman, 2001) dan menciptakan suasana kehidupan yang liberal dan demokratis (Dewey, 2004 & Hutchin, 1999).

Berdasarkan pada pembahasan yang diketengahkan di atas, maka peningkatan mutu pendidikan tentu saja tidak hanya berarti meningkatkan prestasi akademis saja, tetapi membentuk sikap. Sosok manusia berkualitas tidak hanya tercermin dalam kompetensi berpikir, tetapi juga pada kompetensi bersikap dan berperilaku. Dalam ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu metode:

“memberi ilmu *atau pengetahuan*, serta juga memberi kecakapan kepada anak-anak, yang kedua-duanya dapat *berfaedah* buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin” (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).

Untuk mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan intervensi diarahkan pada faktor-

faktor yang secara langsung berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar. Secara kategoris faktor tersebut meliputi *hardware* yang terdiri atas sarana dan prasarana, *humanware* yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan, dan *software* yang terdiri atas kurikulum, metode mengajar. Efektivitas ketiga faktor tersebut tergantung dari sistem manajemen, terutama yang diadopsi oleh sekolah, karena sistem manajemen menentukan kombinasi pemanfaatan ketiga secara lebih efisien. Di samping itu, dengan adanya konteks birokrasi dan geografis yang berbeda-beda antar satu sekolah dengan sekolah lainnya, manajemen menjadi faktor strategis sebagai dasar untuk mencapai target pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah. Manajemen pada salah satu sekolah dapat saja memusatkan pada pemanfaatan sarana yang sudah tersedia di sekolahnya, dan manajemen pada sekolah lain lebih memusatkan pada penyediaan sarana pendidikan, karena di sekolah tersebut belum tersedia sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar yang efektif di sekolah.

Kurikulum merupakan bagian dari *software* bagi berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar yang efektif. Tidak seperti *hardware* dan *humanware*, kurikulum tidak merupakan faktor determinan terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Kurikulum tidak bisa dimanipulasi agar kegiatan belajar-mengajar di kelas dapat berlangsung lebih efektif. Sebaliknya, kurikulum menjadi titik tolak untuk memanipulasi *hardware* dan *humanware*, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif.

Searah dengan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat ini sedang melakukan Pengembangan Kurikulum 2013, tujuan tulisan ini yaitu untuk mengemukakan argumentasi di balik upaya Pengembangan Kurikulum 2013. Argumentasi tersebut yaitu bahwa Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan intervensi kebijakan mutu pendidikan dengan mempertimbangkan keseimbangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Dalam mengemukakan argumentasi tersebut perspektif yang digunakan bukan perspektif pedagogis yang secara mendalam melihat komponen-komponen pandangan filosofis

maupun epistemologis tentang pengembangan kurikulum. Sebaliknya, tulisan ini melihat Pengembangan Kurikulum 2013 sebagai suatu agenda kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, tulisan ini tidak bisa sama sekali menghindari diskusi berkenaan kurikulum dalam perspektif pedagogis.

Di samping untuk menjawab keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 tersebut, tulisan ini juga mengajukan argumentasi bahwa faktor kemampuan guru menjadi faktor utama bagi keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Namun demikian, kemampuan guru dapat mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum 2013, jika kepemimpinan kepala sekolah sebagai manajer sekolah dan kepemimpinan pedagogis guru dapat berlangsung secara efektif.

Pada saat tulisan ini disusun, Pengembangan Kurikulum 2013 sedang pada taraf uji publik, sehingga masih terbuka pintu kemungkinan terjadi perubahan walaupun perubahan tersebut diharapkan tidak secara mendasar akan mengubah niat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan Pengembangan Kurikulum 2013. Artinya hasil uji publik diharapkan tidak menghentikan upaya pengembangan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum telah menjadi keputusan Pemerintah.

Dengan argumentasi tersebut, tulisan ini mengajukan suatu proposisi bahwa pengembangan kurikulum merupakan langkah imperatif sebagai titik tolak peningkatan mutu pendidikan. Pengembangan kurikulum memang akan menimbulkan konsekuensi terhadap tata kelola pada tingkat kelas dan sekolah, bahkan sampai pada ekstra-organisasi sekolah seperti dinas pendidikan dan kementerian. Namun, baik ada maupun tidak ada pengembangan kurikulum, perubahan tata kelola tersebut akan terjadi. Perubahan secara sistematis dan terkoordinasi diharapkan akan terjadi ketika inisiatif pengembangan kurikulum merupakan intervensi kebijakan pendidikan dari Pemerintah.

Kajian Literatur dan Pembahasan Kurikulum sebagai Entitas Kebijakan

Salah satu indikator utama untuk mendeteksi bahwa Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan intervensi kebijakan peningkatan mutu pen-

didikan, jika isi Kurikulum 2013 tersebut mempunyai keterkaitan linier dengan rumusan pada peraturan perundang-undangan. Pengembangan Kurikulum 2013 merujuk pada tujuan sistem pendidikan nasional seperti yang dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Depdiknas, 2003).

Misi yang disampaikan pada Pasal ini mempunyai keterkaitan dalam tiga hal. Pertama, pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan religius. Kedua, Pasal ini juga menekankan bahwa pendidikan mendorong terhadap pembentukan manusia Indonesia yang sehat, dan ketiga Pasal ini menekankan adanya sikap mandiri. Kemandirian merupakan modal bangsa untuk menjadi bangsa yang mandiri dan sejajar dengan bangsa lain.

Sebagai intervensi kebijakan, Pengembangan Kurikulum 2013 mendapat tanggapan dari berbagai kalangan anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan politik. Tidak menutup kemungkinan tanggapan tersebut cenderung mengandung kesalahan interpretasi. Pada harian Kompas hari Senin, 26 November 2012 terdapat artikel berjudul “Prospek Kurikulum Baru” terdapat pernyataan yang tidak tepat. Pernyataan tersebut berbunyi “Di SD misalnya, guru bidang studi studi IPA, IPS, dan Bahasa Inggris akan bagaikan di-PHK” (Suwignyo, 2012). Pernyataan ini mengandung dua ketidaksesuaian. Pertama, guru di SD pada umumnya merupakan guru kelas. Bukan selureuhnya guru mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak akan ada guru yang di PHK meskipun dalam Pengembangan Kurikulum 2013 ada skenario mengintegrasikan

mata pelajaran IPA ke dalam matapelajaran Bahasa Indonesia. Jika skenario tersebut terrealisasi, maka tidak akan ada guru SD yang di PHK. Kedua, pada kurikulum SD tidak pernah ada matapelajaran Bahasa Inggris yang diwajibkan untuk diajarkan. Jika Pengembangan Kurikulum 2013 diimplementasikan tidak ada guru Bahasa Inggris yang akan di-PHK karena memang pada kurikulum yang lama (sebelumnya) tidak ada matapelajaran Bahasa Inggris yang diwajibkan diajarkan di SD.

Adanya matapelajaran bahasa Inggris yang diajarkan kepada siswa SD bukan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun daerah. Ide untuk mengajarkan matapelajaran Bahasa Inggris kepada siswa SD merupakan inisiatif dari SD yang bersangkutan. Pemerintah tidak melarang atau membolehkan jika ada SD yang mengajarkan matapelajaran Bahasa Inggris kepada siswanya dengan beberapa syarat, antara lain: tidak mengganggu pencapaian matapelajaran yang diwajibkan di SD dan jika ada guru SD yang mengajar Bahasa Inggris, maka konsekuensi untuk memberikan gaji kepada guru tersebut merupakan tanggung jawab SD yang bersangkutan.

Di samping itu, dimensi politik selalu akan muncul dalam proses pengembangan Kurikulum 2013. Harian Jakarta Globe (29 November 2012) menyajikan judul artikel yang cenderung menyampaikan pesan pesimisme, sebagai berikut *"Plans for New Curriculum Have Led to Confusion, Lack of Confidence"*. Lebih lanjut, pada tubuh artikel disajikan kalimat berbunyi *"People in the upper rungs of bureaucracy seem to compete with each other in issuing more and more confusing statements and explanations"*. Komentar tersebut lebih melihat pengembangan kurikulum yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai proses politik daripada proses pedagogis. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara uji publik Pengembangan Kurikulum 2013 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 2013, menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan suatu keharusan, karena adanya pengembangan peradaban. Tidak hanya itu, pada abad ini terjadi perubahan dalam pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi empat aspek, yaitu:

informasi, komputasi, otomasi dan komunikasi. Aspek informasi menekankan bahwa siswa didorong untuk mencari tahu, di samping mendapatkan pengetahuan dari guru. Pengetahuan dari guru menjadi dasar bagi siswa untuk mencari informasi lebih lanjut. Komputasi merupakan suatu proses pengembangan daya nalar siswa dengan tidak hanya mampu menjawab persoalan yang dihadapi, tetapi juga mengembangkan sikap bertanya (*skeptisme*) terhadap persoalan yang dihadapi oleh siswa.

Penekanan pada otomasi mendorong siswa untuk lebih berpikir analitis. Setiap kejadian yang ada di sekitar mereka tidak terjadi secara independen, tetapi ada hal lain yang mempengaruhi. Kemampuan untuk mengetahui keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya menjadi siswa mempunyai sikap *curious* terhadap apa yang terjadi. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditapakinya, semakin abstrak sikap *curious* yang dimiliki oleh siswa. Komunikasi merupakan suatu keterampilan untuk menyampaikan pendapat tentang apa yang diketahui kepada siswa lain, dan menerima pendapat dari siswa lain. Proses komunikasi ini merupakan sarana akumulasi pengetahuan pada diri siswa.

Dengan mempertimbangkan empat aspek tersebut, kurikulum yang rencananya akan diberlakukan pada bulan Juli 2013 akan mengantarkan siswa Indonesia menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Hal tersebut terefleksi pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi sikap merefleksikan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, dan juga kepada masyarakat dan lingkungan di mana dia hidup. Keterampilan merupakan indikator kompetensi yang mengekspresikan kemampuan pribadi, baik dalam hal memecahkan masalah yang dihadapi diri sendiri maupun masalah-masalah lingkungan sosial maupun fisik. Pengetahuan merupakan dasar bagi pengembangan kedua indikator kompetensi, yaitu sikap dan keterampilan. Pengetahuan merupakan kompetensi yang tidak secara langsung nampak ketika seseorang tidak terlibat dalam suatu aktivitas. Dengan kata lain, perwujudan pengetahuan dapat terlaksana melalui media kompetensi, sikap, dan keterampilan.

Di samping pertimbangan di atas, pengembangan Kurikulum 2013 merupakan respons terhadap berbagai kritik dan komentar dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat. Wapres Boediono (2012) di harian Kompas, misalnya, melontarkan kritiknya. Dalam artikel yang berjudul "Pendidikan Kunci Pembangunan" Wapres Boediono menyatakan bahwa belum terwujudnya hasil pendidikan yang maksimal karena belum adanya konsep pendidikan yang jelas. Akibatnya, kurikulum cenderung memuat beban berlebihan yang harus dipelajari oleh siswa. Di lain pihak, meskipun kurikulum telah memuat berbagai hal, tetapi masih dinilai belum menghasilkan kompetensi seimbang antara penguatan karakter dan daya nalar siswa. Komentar yang dikemukakan oleh S. Rohman (2012) dan A. Wisnu (2009) menunjukkan kurangnya muatan karakter pada kurikulum yang berlaku saat ini, sementara argumentasi lain menyatakan bahwa kurikulum masih belum meningkatkan kemampuan analisis siswa karena pengajaran Sains masih sebatas teori (Kompas, 7 Juni 2012). Tulisan ini tidak bermaksud membenarkan atau menyalahkan kritik tersebut, tetapi menunjukkan suatu kecenderungan, yaitu ketika pendapat tersebut telah menyebar di publik, maka pendapat tersebut akan membentuk opini publik, seolah-olah memang hal tersebut yang menjadi permasalahan kurikulum.

Kurikulum sebagai intervensi kebijakan peningkatan mutu pendidikan mempunyai berbagai bentuk yang memungkinkan menimbulkan berbagai interpretasi. Scott (2006), misalnya mengidentifikasi enam sudut pandang tentang kurikulum. Keenam sudut pandang ini menyajikan perbedaan sosok kurikulum yang terdiri atas *foundationalism*, *conventionalism*, *instrumentalism*, *technical rationality*, *critical pedagogy*, dan *transgression*. Keenam sudut pandang tersebut akan dielaborasi secara lebih rinci di bawah ini.

Foundationalism menyajikan sosok kurikulum sebagai dasar pembentukan pola perilaku, pola sikap, dan pola berpikir. Sebagai dasar pembentukan ketiga pola tersebut, maka menjadi suatu keharusan bahwa setiap program pengajaran mempunyai dasar kurikulum yang secara seimbang mengandung aspek sikap, perilaku, serta pemikiran.

Dalam melihat sosok kurikulum seperti itu, sudut pandang *foundationalism* mengemukakan argumentasi bahwa *knowledge* merupakan titik dasar untuk membentuk ketiga pola. Dalam hal ini sudut pandang *foundationalism* membedakan antara *knowledge* dengan *rationality*. *Knowledge* merupakan muatan informasi yang disebut dengan pengetahuan, sedangkan *rationality* lebih merupakan pemanfaatan *knowledge* dalam suatu tindakan yang diekspresikan dalam pola sikap, pola perilaku, dan pola pikir.

Conventionalism memandang kurikulum sebagai "*canonical texts that constitute the various disciplinary traditions*" (Scott, 2006) yang perlu untuk dipreservasi sebagai suatu tradisi susunan pengetahuan (*body of knowledge*). Tidak seperti pandangan yang diajukan oleh *foundationalism*, pandangan *conventionalism* mempunyai sudut pandang lebih praktis. Kurikulum merupakan sarana untuk menghantarkan siswa menjadi manusia yang mempunyai kompetensi sehingga dia mampu bersaing dalam pasar kerja. Oleh karena itu, sudut pandang *conventionalism* cenderung lebih mengarah pada kejuruan daripada akademis. Namun demikian, bukan berarti bahwa sudut pandang *conventionalism* tidak setuju dengan pendidikan umum seperti SMA, penekanan sudut pandang ini yakni bahwa setiap kurikulum ditujukan untuk memberikan bekal kepada para siswa, sehingga mereka siap untuk memasuki pasar kerja.

Instrumentalism memandang kurikulum sebagai alat (instrumen) untuk menjadikan (bukan mengantarkan) setiap siswa menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya, sehingga mereka dapat hidup bahagia (*having good life*). Kritik yang disampaikan terhadap pandangan *instrumentalism* yaitu tentang definisi hidup bahagia yang tidak bisa diukur. Pandangan ini memang tidak memberikan definisi yang jelas tentang hidup bahagia. Namun demikian, pandangan ini tidak juga menolak bahwa hidup bahagia dapat diukur dengan kriteria ekonomi (*economism*), tetapi kriteria ekonomi bukan satu-satunya ukuran hidup bahagia.

Technical rationality merupakan pandangan yang tidak beda, terutama dengan pandangan *instrumentalism* dalam konteks bahwa kurikulum merupakan sarana untuk menghantarkan siswa

menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Pandangan ini juga mempunyai kesamaan dengan sudut pandang dari *foundationalism*, *conventionalism* dalam arti kurikulum mempunyai muatan *knowledge* di dalamnya. Perbedaan pandangan *technical rationality* dengan pandangan lainnya terletak pada penekanan konsep *knowledge* yang terkandung dalam kurikulum. Pandangan ini secara eksplisit membedakan antara *knowledge* yang sudah terkandung dalam kurikulum dengan *knowledge creation*. *Knowledge creation* merupakan proses pengembangan berdasarkan *knowledge* yang para siswa peroleh dari kurikulum. *Knowledge creation* ini akan menghantarkan mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab ketika mereka tumbuh dewasa.

Dalam perspektif ekonomi, *knowledge* yang sudah terkandung dalam kurikulum merupakan *initial endowment*. Kemampuan kurikulum untuk menjadikan setiap siswa mempunyai nilai tambah ketika dalam proses belajar tersebut tumbuh dari *knowledge creation*. Dalam konsep ini, kurikulum hampir sama maknanya dengan *learning*. Dalam konsep *learning* terdapat proses dialogis antar guru sebagai sumber dan siswa sebagai penerima *knowledge*. Lebih tepatnya konsep *learning* yang dimaksud yaitu *learning maps*, seperti yang didefinisikan oleh Rose dan Nicholl (1997): *„are a dynamic way to capture points of informations“*. Dalam definisi ini kata *points of information* mengandung makna bahwa informasi yang dimaksud bukan sekedar informasi dalam pengertian khalayak pada umumnya, tetapi informasi yang mengandung makna *knowledge creation*.

Critical pedagogy menyajikan kurikulum sebagai entitas yang lebih radikal, karena dalam pandangan ini menjadikan kurikulum bukan hanya sebagai sarana untuk mentransfer *knowledge* dari guru kepada siswa, tetapi *“the curriculum should be enacted so as to identify and unmask those human beliefs and practices that limit freedom, justice and democracy”* (Scott, 2006). Dalam perspektif politik yang ekstrim, kurikulum merupakan sarana “indoktrinasi” bagi siswa, sehingga mereka akan mempunyai suatu pemahaman tentang kehidupan sosial yang mereka hadapi sesuai dengan apa yang mereka yakini.

Transgression menampilkan sosok kurikulum yang didasarkan pada perspektif *postmodernism*. Di antara ciri-ciri yang menonjol dari pandangan *transgression* yaitu melihat kurikulum dari sudut pandang yang lain daripada apa yang secara konvensional orang memandang kurikulum. Pandangan ini melihat kurikulum sebagai kemauan penguasa. Dengan pendekatan *binary*, pengembangan kurikulum merupakan dekonstruksi kemauan penguasa kepada “pihak lain”. Namun demikian, tidak ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan “pihak lain” tersebut. Upaya dekonstruksi tidak hanya pada isi kurikulum, tetapi juga termasuk pada bahasa dan isi dari buku teks yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Dengan demikian, permasalahan yang menjadi pusat perhatian dari sudut pandang ini yakni yang penting dari sosok kurikulum, bukan seberapa komprehensif isi kurikulum tersebut, tetapi apakah isi kurikulum tersebut sebagai refleksi dari kemauan penguasa atau bukan. Dalam konteks pengembangannya ada suatu proses dialogis antara penguasa dan “pihak lain” (guru?) jika kurikulum harus mempunyai tingkat akseptabilitas tinggi (Reid, 2005). Dalam proses negosiasi, lebih dari sekedar dialog, baik penguasa atau “pihak lain” sebagai pelaksana kurikulum mempunyai daya tawar pada proporsinya masing-masing. Konsekuensi jika tidak tercapai kesepakatan, maka kurikulum tidak dilaksanakan.

Dalam suatu sistem pendidikan, meskipun melalui proses negosiasi yang mungkin berlangsung lama, tidak ada kegiatan belajar mengajar yang tidak didasarkan pada kurikulum. Kurikulum tetap merupakan suatu dasar bagi dilaksanakannya kegiatan mengajar. Ketika kurikulum diarahkan untuk mengakumulasi kemaslahatan pedagogis bagi semua siswa secara non-diskriminatif, maka pengembangan kurikulum senantiasa didasarkan pada pertimbangan moral (Hausman dan McPherson, 2006). Memasukkan pertimbangan moral tidak berarti meniadakan proses negosiasi dengan pihak sekolah, negosiasi yang berlangsung tidak didasarkan pada mempertahankan kepentingan masing-masing, tetapi lebih penting daripada itu, negosiasi merupakan cara untuk merekonsiliasi

subyektivitas dari masing-masing pihak, sehingga kurikulum dapat memfasilitasi minat dan bakat siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik perbedaan itu adalah agama, stratifikasi sosial, atau karakter pribadi siswa.

Faktor Pendukung Implementasi Kurikulum

Efektivitas kurikulum sebagai intervensi kebijakan peningkatan mutu pendidikan bukan terletak pada perumusan isinya, tetapi terutama pada pelaksanaannya. Namun demikian, pelaksanaan kurikulum tidak juga bisa dilaksanakan jika misi dan isi kurikulum di luar kemampuan para guru untuk memahaminya, sehingga mereka tidak dapat mengartikulasikan isi kurikulum menjadi topik bahasan dari satu atau lebih mata pelajaran. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa ketika misi dan isi kurikulum merupakan ungkapan utopis (Halpin, 2006), kecil kemungkinan isi kurikulum tersebut dapat direalisasi dalam suatu proses interaksi di dalam ruang kelas melalui kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pihak, yaitu guru dan siswa. Walker (1992) meringkasnya dengan pernyataan sebagai berikut: *"No curriculum development is possible without assumptions about how learning and teaching can and should proceed"*.

Salah satu argumentasi menyatakan bahwa efektivitas implementasi kurikulum tergantung pada kompetensi guru dan sarana yang tersedia di sekolah yang memfasilitasi guru dalam mengartikulasi topik-topik bahasan yang dianjurkan kurikulum. Diperlukan *software* untuk memfasilitasi maksimalisasi peran guru dan pemanfaatan sarana untuk mencapai hasil yang maksimal. *Software* tersebut yaitu manajemen pendidikan, baik di tingkat kelas, sekolah maupun ekstra-organisasi sekolah seperti kantor dinas atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tulisan ini memusatkan perhatian pada manajemen sebagai media untuk maksimalisasi peran guru dan ketersediaan sarana di sekolah. Manajemen yang dimaksud yaitu manajemen sekolah yang berada di bawah pengendalian kepala sekolah, manajemen kelas yang berada di bawah pengendalian guru.

Secara definisi manajemen merupakan suatu proses pengalokasian dan pengaturan sumber daya untuk memperoleh hasil optimal (Coleman,

2010) dan proses optimalisasi tersebut hanya dapat berlangsung dalam suatu organisasi karena *"Management is the specific and distinguishing organ of any and all organizations"* (Drucker, 1999). Mengapa demikian? karena dalam suatu organisasi terdapat aturan main yang diformalkan dan pimpinan yang mengatur proses tersebut. Peran pemimpin yang menentukan arah alokasi dan mobilisasi sumber daya yang tersedia di suatu organisasi.

Dalam konteks pelaksanaan kurikulum kepala sekolah merupakan pemimpin organisasi pendidikan yang disebut sekolah. Kepala sekolah menentukan alokasi sumber dana dan memobilisasinya menjadi target-target pendidikan yang akan dicapai pada periode tertentu. Karena peran ini, maka kepala sekolah menjadi *critical factor* bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan mengajar di sekolah (Earley dan Weindling; 2004).

Dalam mengelola kurikulum sebagai program pendidikan yang harus dijabarkan dalam kegiatan belajar, kepala sekolah mempunyai dua peran, yaitu sebagai manajer kurikulum dan manajer program. *"It is classroom practice that has the most direct impact on student learning"* demikian dinyatakan oleh Hopkins (2001). Implikasi dari pernyataan ini yaitu bahwa pusat perhatian kepala sekolah, baik dalam fungsinya sebagai manajer program maupun manajer kurikulum dinamika yang terjadi pada ruang kelas. Apa yang terjadi dalam kelas memang merupakan *black box* yang hanya diketahui oleh guru dan siswa. Namun demikian, apa yang terjadi di dalam kelas bukan merupakan suatu kondisi di luar kendali kepala sekolah.

Kegiatan belajar mengajar yang terjadi dalam ruang kelas melibatkan tiga faktor yaitu: guru, siswa, dan sarana pendidikan yang dimanfaatkan oleh guru dalam mengajar. Di antara tiga faktor tersebut, faktor sarana yang berada dalam kendali penuh kepala sekolah, dalam arti kepala sekolah dapat menentukan jumlah dan jenis sarana yang diperlukan. Adapun faktor guru dan siswa merupakan dua faktor yang tidak dapat sepenuhnya dalam kendali kepala sekolah. Dimensi kecerdasan dan motivasi tidak sepenuhnya dalam kendali kepala sekolah. Berkenaan dengan motivasi dan kecerdasan guru dan siswa yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah yaitu menciptakan kondisi

yang kondusif bagi terciptanya kegiatan belajar-mengajar di kelas yang efektif.

Penciptaan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar dan mengajar yang efektif muncul dalam peran kepala sekolah sebagai manajer kurikulum. Sebagai manajer kurikulum, kepala sekolah memastikan empat hal. Pertama, terciptanya kesempatan bagi guru untuk mengartikulasikan isi kurikulum menjadi topik-topik bahasan yang kontekstual dan relevan dengan tingkat daya pikir siswa dan lingkungan sosial siswa. Kedua, terciptanya kondisi bagi perubahan dan pengembangan, baik pada guru maupun siswa sebagai bagian dari proses kreatif. Ketiga, terciptanya kesempatan, terutama bagi guru, untuk mendapatkan masukan terhadap metode belajar yang digunakan oleh guru dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif di kelas. Masukan tersebut berasal dari berbagai pihak termasuk dari siswa. Keempat, mendorong guru untuk mempunyai sensitivitas terhadap berbagai perubahan untuk dipertimbangkan dan diadopsi dalam pengembangan metode belajar dan cara pencapaian isi kurikulum kepada siswa (Duignan & Macpherson, 1992).

Dalam praktiknya peran kepala sekolah sebagai manajer kurikulum dan manajer program berhimpit. Perbedaan yang ada hanya pada tataran akademis. Dengan alasan itu, tulisan ini mengidentifikasi dua peran kepala sekolah sebagai program manajer. Pertama adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan strategis pendidikan pada tingkat sekolah. Kemampuan ini menjadi dasar dalam alokasi sumber dan kompetensi guru yang diperlukan untuk dapat merealisasikan misi sekolah. Tujuan strategis ini tentu saja tidak hanya merujuk pada pencapaian yang telah diperoleh oleh sekolah pada masa lalu, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan di luar bidang pendidikan. Penentuan tujuan strategis ini didasarkan satu argumentasi bahwa hasil pendidikan tidak diarahkan pada pencapaian *internal utility*, tetapi lebih dari itu, yaitu *external utility* di mana kegunaan untuk mendukung, misalnya, pertumbuhan ekonomi, demokratisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi *learning needs* siswa yang terdaftar pada sekolah yang dipimpinnya.

Pemahaman *learning needs* menentukan tingkat kebutuhan sarana dan gaya mengajar guru agar setiap siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal. Kemampuan untuk mengidentifikasi *learning needs* ini lebih berorientasi pada kondisi internal sekolah daripada eksternal sekolah (Conger & Xin 2000).

Efektivitas peran kepala sekolah sebagai manajer kurikulum dan manajer program merupakan dua sisi dari satu mata uang. Kedua sisi tersebut harus hadir secara bersama-sama dalam proporsi yang setara. Pengembangan Kurikulum 2013 yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini memerlukan dukungan kepala sekolah dengan dua sisi kepemimpinan ini. Kedua sisi kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan kepemimpinan edukatif, dengan elaborasi sebagai berikut:

"..... the educative leader is a negotiator, an analyst of educational situations, an evaluator of the relative merits of a variety of often conflicting viewpoints, a confident decision maker, a teacher, and, most importantly, a learner. The leader brings all these together in curriculum development" (Walker, 1992).

Sebagaimana diketengahkan di atas efektivitas implementasi kurikulum merupakan hasil "rekayasa" kepemimpinan kepala sekolah, baik sebagai manajer kurikulum maupun manajer program. Pada pembahasan di atas juga diketengahkan bahwa apa yang terjadi di ruang kelas merupakan fenomena *black box*. Hanya guru dan siswa yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang kelas ketika kegiatan belajar mengajar terjadi. Kepala sekolah tidak bisa secara langsung mengintervensi terhadap apa yang terjadi di dalam ruang kelas. Sebaliknya, peran kepemimpinan kepala sekolah menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas yang berlangsung secara efektif dapat terwujud jika didukung oleh para guru yang kompeten.

Kompetensi guru merupakan faktor determinan agar apa yang terjadi di dalam ruang kelas kondusif bagi terjadinya kegiatan belajar-mengajar yang efektif. Kompetensi guru merupakan salah satu konsep yang menjelaskan tentang karakteristik guru dalam mengelola

kegiatan belajar di kelas (Holland, 2001). Dalam konteks manajemen kelas tulisan ini mengajukan konsep kepemimpinan pedagogis guru sebagai refleksi kompetensi untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar yang efektif di kelas. Pada tulisan ini kepemimpinan pedagogis merujuk pada kemampuan dan keterampilan dalam tiga hal, yaitu artikulasi isi kurikulum menjadi topik bahasan yang komprehensif dan kontekstual, komunikasi konsep tersebut menjadi suatu penjelasan yang ilustratif bagi siswa, dan evaluasi tingkat pemahaman siswa terhadap apa yang diajarkan.

Berbagai literatur (misal. Danielson, 2006; Quinn, et.al. 2010) tidak secara eksplisit menyebut kepemimpinan pedagogis, tetapi mereka menyebutnya kepemimpinan guru. Meskipun demikian, dalam menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan guru tersebut terdapat makna yang sama dengan kepemimpinan pedagogis yang dimaksud dalam tulisan ini. Dalam penjelasan yang dikemukakan mereka, kepemimpinan oleh guru mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengendalikan kelas. Secara lebih eksplisit, Danielson (2006) menyebutkan karakteristik kepemimpinan guru "*It entails mobilizing and energizing others with the goal of improving the school's performance of its critical responsibilities related to teaching and learning*". Oleh karena itu, agar kepemimpinan guru dapat mewujudkan kegiatan belajar-mengajar yang efektif yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan memobilisasi berbagai sumber belajar yang tersedia dan mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dan memantau dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa.

Teknologi informasi telah merupakan bagian dari kehidupan praktis hampir setiap orang dari berbagai profesi, termasuk siswa. Teknologi informasi, terutama pada sekolah-sekolah di kota besar, telah menjadi bagian dari sarana kegiatan belajar di kelas. Dengan teknologi informasi kegiatan belajar dapat berlangsung secara lebih visual, sehingga siswa dapat menangkap konsep yang dia pelajari, karena konsep tersebut dapat divisualisasikan oleh teknologi informasi. Tidak hanya itu, teknologi informasi memungkinkan bagi siswa secara bersama-sama mempelajari suatu konsep, karena teknologi informasi dapat

menyajikan informasi pada tempat dan waktu yang bersamaan kepada lebih dari satu pengguna (Amelung, 2007). Ke depan, penggunaan teknologi informasi secara lebih luas menjadi sarana kegiatan belajar-mengajar di kelas, sehingga siswa yang berada di daerah pedesaan dan perkotaan mempunyai akses yang sama terhadap konsep yang mereka pelajari pada tingkat *comprehensiveness* yang sama juga. Penggunaan teknologi informasi bagi siswa Taman Kanak-kanak di Hongkong memungkinkan para siswa untuk menyimpan hasil kerjanya. Hasil kerja tersebut dapat dilihat lagi serta diperbaiki oleh siswa (Leung, 2003). Dengan penggunaan teknologi informasi bagi siswa Taman Kanak-kanak tidak saja belajar menjadi lebih menyenangkan, tetapi anak terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam melakukan penilaian guru tidak hanya memperhatikan apa yang telah dicapai oleh siswa, tetapi juga kemajuan yang dicapai oleh siswa.

Mengingat pentingnya peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan belajar di kelas, CERI (2009) mengajukan paling tidak empat saran untuk mengadopsi teknologi informasi dalam kegiatan belajar-mengajar. Saran tersebut didasarkan pada hasil studi yang dilakukan di negara-negara Nordic, Eropa yaitu Denmark, Finlandia, Iceland, dan Norwegia, serta Swedia. Keempat saran tersebut, yaitu: pertama, membuka kesadaran para guru tentang keberadaan teknologi informasi yang semakin persuasif. Ekspos siswa terhadap informasi berkenaan dengan apa yang dipelajari di kelas akan semakin luas dan jumlah yang tidak terbatas. Kedua, sekolah perlu segera menyediakan sumber-sumber belajar yang berbasis teknologi informasi. Implikasi dari hal ini yaitu bahwa konsep perpustakaan sekolah akan berubah secara fisik, yang semula perpustakaan terdiri atas susunan rak buku, akan menjadi *work-station* yang memungkinkan siswa melakukan eksplorasi informasi dari berbagai sumber. Meskipun demikian, keberadaan buku teks tidak akan hilang sama sekali. Ketiga, perlu dibentuk mekanisme yang *coherence* antara sistem belajar-mengajar di kelas yang berbasis teknologi informasi dengan sistem evaluasi kemajuan belajar siswa yang juga menggunakan teknologi informasi. Keempat,

konsekuensi dari ketiga hal tersebut, program pelatihan teknologi informasi kepada kepala sekolah dan guru menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks Indonesia, pelatihan ini dapat dilakukan secara bertahap mulai dari sekolah-sekolah yang mempunyai akses internet, baik di kota besar, kota kabupaten/kota atau daerah pinggiran kota yang telah mempunyai akses terhadap internet. Paling tidak, pelatihan dapat diprioritaskan kepada sekolah yang sudah dilengkapi dengan aliran listrik, karena pada sekolah ini siswa dapat melakukan ekspos informasi berkenaan dengan konsep-konsep yang dipelajari menggunakan komputer *off-line*.

Simpulan dan saran

Simpulan

Pengembangan Kurikulum 2013 yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai misi utama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan berbagai segi kehidupan, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi dan politik. Namun demikian, karena kurikulum merupakan bagian dari kebijakan publik pendidikan, selalu terdapat dua jenis tanggapan yaitu setuju dan tidak setuju dengan ide pengembangan kurikulum.

Konsekuensi lebih lanjut dengan status kurikulum sebagai kebijakan publik pendidikan adalah bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan memuaskan semua pihak. Hal ini didasarkan pada suatu realita bahwa masih adanya tingkat perbedaan perkembangan pendidikan, baik antarprovinsi dan apalagi antar kabupaten/kota.

Namun demikian, Pengembangan Kurikulum 2013 telah menjadi keputusan Pemerintah. Ketika Pengembangan Kurikulum 2013 tersebut telah menjadi keputusan Pemerintah, maka tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mencari strategi paling efektif dan efisien agar kurikulum tersebut dapat segera dilaksanakan. Keputusan yang telah diambil pada bulan Juni 2013 kurikulum tersebut akan diterapkan.

Di antara berbagai tantangan, kompetensi guru menjadi tantangan yang paling menonjol. Guru diasumsikan tidak akan siap melaksanakan

Kurikulum 2013 jika dilaksanakan pada bulan Juni 2013. Dengan kata lain, Pemerintah dianggap tergesa-gesa dalam menerapkan Kurikulum 2013. Di lain pihak, tanggapan yang pesimis menyatakan bahwa pemerintah tergesa-gesa mengambil keputusan untuk mengubah kurikulum, karena pelaksanaan kurikulum yang sekarang berlaku saja belum sepenuhnya dipahami.

Dengan memperhatikan berbagai pro dan kontra berkenaan dengan kemungkinan diterapkannya Kurikulum 2013, tulisan ini mengajukan suatu proposisi yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kurikulum tergantung pada faktor manajemen. Dalam konteks ini manajemen yang dimaksud yaitu manajemen pada tingkat sekolah dan kelas. Inti dari faktor manajemen tersebut adalah kepemimpinan.

Kepemimpinan pada tingkat sekolah meliputi dua peran, yaitu kepala sekolah sebagai manajer kurikulum dan manajer program. Meskipun keduanya merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi dalam praktiknya kepala sekolah tidak bisa memisahkan satu dengan lainnya. Keduanya bahkan bisa berlangsung secara bersamaan atau saling melengkapi. Keduanya mendorong ke arah terwujudnya kegiatan belajar-mengajar yang efektif di kelas. Kriteria ini dapat terwujud melalui pembinaan dan bimbingan kepada guru serta penentuan alokasi sumber daya yang tersedia di sekolah.

Adanya fenomena *black box* dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, maka kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif di kelas dapat terselenggara ketika kepemimpinan guru menjadi faktor pendukung (*complementary factor*). Dalam tulisan ini kepemimpinan guru disebut dengan kepemimpinan pedagogis. Karakteristik dari kepemimpinan pedagogis meliputi tiga hal, yaitu kompetensi menjabarkan isi kurikulum, kemampuan mengkomunikasikan isi kurikulum kepada siswa, dan kemampuan untuk melakukan penilaian.

Teknologi informasi telah menjadi sarana pendidikan yang semakin pervasif. Hal ini tentu saja mempunyai konsekuensi positif terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswa semakin mudah untuk melakukan eksplorasi informasi untuk memperdalam pemahamannya

terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Peran guru memang masih menjadi faktor utama, tetapi tidak lagi menjadi sumber belajar satu-satunya. Konsekuensinya guru juga dituntut untuk segera meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan teknologi informasi, jika tidak ingin tertinggal dari siswanya. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap.

Saran

Saran yang diajukan pada tulisan ini diarahkan pada upaya menjamin efektivitas implementasi Pengembangan Kurikulum 2013. Berkenaan dengan hal tersebut, saran secara spesifik memusatkan pada sudut pandang Kurikulum 2013 sebagai entitas kebijakan publik bidang pendidikan. Dikatakan demikian, karena ketika Kurikulum 2013 diimplementasikan akan melibatkan guru dan siswa seluruh Indonesia. Orang tua sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stake holder*) pendidikan sangat berkepentingan terhadap kemandirian Kurikulum 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi akademis siswa.

Saran yang kedua yaitu pada tingkat strategi dengan mempertimbangkan faktor manajemen pada tingkat sekolah dan kelas. Faktor utama yang akan diketengahkan yakni kepemimpinan kepala sekolah dan guru.

Oleh karena Pengembangan Kurikulum 2013 telah menjadi keputusan Pemerintah, maka posisi pengembangan ini telah berada pada tahap *point of no return*. Saran yang diajukan yaitu: uji publik secara ekstensif menjadi suatu keharusan sebelum Kurikulum 2013 ditetapkan sebagai kebijakan efektif. Tujuan utama uji publik yaitu menggali pendapat dari berbagai pihak dan mengakomodasikan pendapat tersebut dalam finalisasi konsep. Namun, dalam mengakomodasikan pendapat tersebut, terdapat berbagai kelompok yang antara lain terdiri atas guru, kepala sekolah, pengamat pendidikan, orang tua siswa, anggota organisasi profesi, dan anggota masyarakat pada umumnya. Dari berbagai kelompok tersebut, tulisan ini mengajukan pendapat guru dan kepala sekolah perlu mendapatkan prioritas utama untuk diakomodasikan dalam penyempurnaan dokumen. Pertimbangan utama karena guru dan kepala sekolah merupakan

constituent Kurikulum 2013. Mereka merupakan pihak yang secara langsung menjadi target utama pelaksanaan hasil Pengembangan Kurikulum 2013 dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan peserta didik. Pendapat dari orang tua siswa patut mendapatkan perhatian karena mereka juga menjadi *constituent* dari orang hasil pendidikan anaknya.

Pendapat dari kelompok lain merupakan refleksi *stake holders*. Untuk mengakomodasikan pendapat mereka diharapkan tidak secara signifikan mengubah masukan dari *constituent*. Pendapat *stakeholder* melengkapi pendapat guru, kepala sekolah, dan orang tua dan bukan sebagai substitusi pendapat mereka.

Pada tingkat implementasi, sebagaimana dikemukakan pada diskusi, faktor manajemen sekolah dan kelas menjadi determinan untuk menjamin efektivitas implementasi Kurikulum 2013. Inti dari manajemen pada kedua tingkat tersebut yaitu kepemimpinan. Oleh karena itu, agar implementasi Kurikulum 2013 dapat didukung dengan kepemimpinan yang efektif di dua tingkat tersebut, disarankan bahwa implementasi Kurikulum 2013 membawa dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme kepala sekolah dan guru. Profesionalisme yang dimaksudkan yaitu sistem pengangkatan kepala sekolah dan guru menuju jabatan profesional agar lebih terukur dan transparan. Dengan dua kriteria tersebut, maka mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan guru pada jabatan profesional dapat meminimalisir unsur politik, terutama politik pemerintah daerah.

Bagi kepala sekolah dan guru yang telah mendapatkan jabatan fungsional, maka sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, perlu untuk diberikan diskresi dalam mengelola sekolah bagi kepala sekolah dan kelas bagi guru secara independen. Ketika diskresi sudah diberikan kepada kepala sekolah dan guru maka mereka dapat dituntut untuk menetapkan *benchmark* yang akan dicapai pada periode tertentu. Dengan pencapaian *benchmark* tidak hanya mendorong kepala sekolah dan guru lebih transparan dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas menjadi kriteria pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.

Ketika teknologi informasi telah bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan belajar mengajar, maka penggunaan teknologi informasi pada sebagian besar sekolah di Indonesia hanya masalah waktu. Implikasi dari situasi ini baik kepala sekolah maupun guru tidak bisa lagi imun dari penggunaan teknologi informasi; atau pilihan lain mereka merelakan dirinya tertinggal oleh kemajuan zaman yang semakin berorientasi pada penggunaan teknologi informasi. Penguasaan dan penguasaan teknologi bagi kepala sekolah dan guru merupakan suatu keharusan. Bagi kepala sekolah penggunaan teknologi informasi diarahkan pada penyusunan program yang didasarkan pada data yang akurat dan tepat waktu, sehingga implementasi Kurikulum 2013 dapat berlangsung secara tepat waktu.

Bagi guru, pemanfaatan teknologi informasi diarahkan pada visualisasi konsep abstrak men-

jadi lebih visual sehingga siswa, terutama untuk siswa SD dan SMP pada kelas-kelas awal, dapat menangkap makna dari suatu konsep yang dijelaskan oleh guru. Dengan teknologi informasi guru diharapkan dapat melakukan penilaian yang lebih obyektif dalam arti mempertimbangkan proses daripada hasil akhir dari suatu pekerjaan. Dalam skenario Pengembangan Kurikulum 2013, pendekatan kegiatan belajar mengajar SD akan menggunakan pendekatan tematik. Berdasarkan pendekatan ini siswa tidak akan secara spesifik belajar konsep, tetapi tema bahasan. Dengan teknologi informasi ada dua informasi yang diharapkan dapat diperoleh oleh guru tentang siswa yaitu proses akumulasi pengetahuan yang diperoleh oleh siswa, dan pemahaman komprehensif siswa terhadap apa yang dipelajari.

Pustaka Acuan

- Anonim. 29 November 2012. Plans for New Curriculum Have Led To Confusion, Lack of Confidence. *Jakarta Globe*. Hal. 10.
- Amelung, C. 2007. Using Social Context and E-Learner Identity as a Framework for an E-Learning. *International Journal on ELearning*; 6, 4; Hal. 501-517.
- Boediono, 27 Agustus, 2012. Pendidikan Kunci Pembangunan. *Kompas*. Hal 5.
- Centre for Educational Research and Innovations (CERI). 2009. *Beyond Textbooks: Digital learning resources as systemic innovation in the Nordic countries*. OECD: CERI.
- Checchi, D. 2005. *The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press
- Coleman, P. 2010. *Management Briefs: Management and Leadership Theory Made Simple*. Bookboon.com. Coleman Patterson & Ventus publishing Apps.
- Conger, J.A. dan Xin, K. 2000. Executive Education in the 21st century. *Journal of Management*. 24, 1. Hal.73-101.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Danielson, C. 2006. *Teacher Leadership that Strengthens Professional Practice*. Alexandria, VA: ASCD publications
- Dewey, J. 2004. *Democracy and Education*. Mineola, New York: Dover Publication. Inc.
- Drucker, P.F. 1999. *Management Challenges for the 21st Century*. New York: Harper Collins Publishers Inc.

- Duignan, P.A. & Macpherson, R.J.S. 1992. Educational Leadership for Curriculum Development: A Synthesis and a Comentary. Dalam *Educative Leadership: A Practical Theory for New Administrators and Managers*. London: The Falmer Press. Hal. 83-84.
- Earley, P. & Weindling, D. P. 2004. *Understanding School Leadership*. London: Chapman Publishing
- Flap, H. & Boxman, E. 2001. Getting Started: The Influence of Social Capital on the Start of the Occupational Career. Dalam Lin, N; Cook; K; dan Burt, R.S. (Eds). *Social capital; theory and research*. New York: Aldine de Gruyter.
- Halpin, D. 2006. Understanding Curriculum as Utopian Text. Dalam Moore, A.(eds) *Schooling, Society and Curriculum*, New York: Routledge.
- Hausman, D.M. & McPherson, M.S. 2006. *Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy (Second Edition)*. Cambridge: Cambridge University Press
- Holland, R. 2001. How to Build a Better Teacher. *Policy Review; 106*. Hal. 37-47.
- Hopkins, D. 2001. *School Improvement for Real*. New York: Routledge Falmer.
- Hutchin, R.M. 1999. Pendidikan Liberal Sejati. Dalam Freire, P; Illich, I, dan Fromm, E. (eds, terjemahan). *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leung, W. M. 2003. The Shift from a Traditional to a Digital Classroom: Hongkong Kindergartens. *Childhood Education; 80, 1*. Hal 12-17.
- Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1977. (Cetakan ke 2). *Karya Ki Hadjar Dewantar. Bagian pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- McInstosh, S 2008. *Education and Employment in OECD Countries*. UNESCO, International Institute for Educational Planning.
- Petters, M.A., 2010. Creativity, Openess, and The Global Knowledge Economy: The Advent of User-generated Cultures. *Economic, Management and Financial Markets*. Vol. 5 (3). Hal. 15-36.
- Powell, W. W & Snellman. K 2004. The Knowledge Economy. *Annual Review of So-ciology*. 30. Hal. 199-220.
- Pultorak. E. G. (eds). *The Purposes, Practices, and Professionalism of Teacher Reflectivity: Insights for Twenty-First-Century Teachers and Students*. Lanham: Rowman & Littlefield Education
- Reid, J. 2005. *Negotiating Education*. Dalam Boomer, G et.al. (2005). *Negotiating the Curriculum: Educating for the 21st Century*. London: The Falmer Press.
- Rohman, S. 3 Agustus, 2012. Kurikulum Berbasis Kekerasan. *Kompas*. Hal. 6.
- Rose, C. & Nicholl, M.J. 1997. *Accelerated Learning for the 21st century*. New York: Delacorte Press.
- Schultz, T.W. 1977. Investment in Human Capital. Dalam Karabel, J. dan Halsey A.H. *Power and Idelogy in Education*. New York: Oxford University Press.
- Scott, D. 2006. *Six Curriculum Discourses: Contestation and Edification*. Dalam Moore, A. (eds) *Schooling, Society and Curriculum* New York: Routledge.
- Suwignyo, A. 26 November 2012. Prospek Kurikulum Baru. *Kompas*, hal. 7.
- Walker. J.C. 1992. A Philosophy of Leadership in Curriculum Development: A Pragmatic and Holistic Approach. Dalam *Educative Leadership: A Practical theory for new administrators and managers*. London: The Falmer Press.

Wisnu, A. 22 Mei 2009. Character Bulding: The Missing Link in Indonesia's Public School Curriculum, *The Jakarta Post*. Hal. 19.

Wisnu, A. 7 Juni 2012. Pendidikan Sains Masih Sebatas Teori. *Kompas*. Hal. 7.

_____. 1977. (Cetakan ke 2). Karya Ki Hadjar Dewantar. Bagian pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

_____. 29 November 2012. menyajikan judul artikel yang cenderung menyampaikan pesan pesimisme, sabagai berikut *Plans for New Curriculum Have Led to Confusion, Lak of Confidence*. *Jakarta Globe*. Hal, 10.